

Warga Palestina Eksodus Massal dari Deir Al-Balah

DEIR AL-BALAH (KR) - Ribuan warga Palestina mengungsi dari sebagian wilayah Deir el-Balah, setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi baru dari daerah paling padat penduduknya di Gaza itu. Dilansir *Al Jazeera*, Kamis (22/8), eksodus massal itu terjadi saat Israel memperluas operasi darat dan pasukannya maju lebih dalam ke pusat kota yang penuh sesak.

Reporter *Al Jazeera* Maram Humaid melaporkan gelombang teror dan kepanikan melanda saat orang-orang bergegas pergi mengikuti perintah evakuasi tersebut. Para saksi menuturkan tank-tank Israel di dekat daerah sekolah al-Mazraa, tenggara Deir Al-Balah.

Jurnalis Palestina Dia Lafi mengatakan tank-tank itu mendekati salah satu sekolah dan mulai menembaki warga sipil. *Drone* tempur juga menembaki orang-orang. "Tidak ada tempat untuk pergi, tidak ada transportasi bagi mereka yang mencoba pergi mengungsi lagi," ujarnya.

Salah satu pengungsi Mohammad Yasser menyebut evakuasi terasa seperti eksodus massal. "Tidak ada tempat untuk dituju. Deir Al-

Balah adalah tempat persinggahan terakhir. Kami akan berakhir duduk di jalanan," ungkapnya.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan perintah evakuasi terbaru yang dikeluarkan untuk sebagian Deir al-Balah di Gaza tengah dan Khan Younis di selatan memengaruhi 115 lokasi dengan lebih dari 150.000 orang yang mengungsi, termasuk selter PBB dan banyak tempat penampungan darurat. Perintah tersebut juga berdampak pada kantor serta gudang PBB dan organisasi kemanusiaan.

Perintah tersebut juga menyebabkan tiga sumur air yang melayani puluhan ribu orang tidak dapat diakses. "Di Deir Al-Balah, pasokan air telah berkurang hingga 70 persen, dan juga terjadi kekurangan



KR-AP Photo/Abdel Kareem Hana

Tenda-tenda darurat yang padat menampung pengungsi Palestina di tepi pantai di barat Deir Al-Balah, Gaza.

kritis bahan sanitasi dan kebersihan," kata Dujarric seperti dikutip AP.

Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNRWA) mengatakan sekitar 30.000 orang berdesakan di setiap kilometer persegi di Gaza di tengah perintah evakuasi Israel. Hanya sekitar 9 persen dari Jalur Gaza yang sekarang ditetapkan sebagai

'zona aman' oleh militer Israel. Israel telah berulang kali melakukan serangan di daerah-daerah 'aman' tersebut, yang kekurangan infrastruktur dasar dan air serta sangat padat penduduk. Lembaga Medecins Sans Frontieres (MSF) mengatakan perintah evakuasi baru Israel tidak manusiawi.

(Bro)-d

Rusia dan China Perkuat Kemitraan Ekonomi

MOSKOW (KR) - Rusia dan China memperkuat kemitraan terutama di bidang ekonomi, di tengah meningkatnya ketegangan hubungan kedua negara dengan Barat. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji hubungan dagang yang berkembang dengan China di saat Moskow makin bergantung pada Beijing untuk dukungan politik dan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Putin saat bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Kremlin, Rabu (21/8) waktu Moskow. "Hubungan perdagangan kita terus berkembang dengan sukses. Perhatian yang di-



KR-Kremlin Pool Photo via AP

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) menyambut Perdana Menteri China Li Qiang di Kremlin.

berikan pemerintah kedua negara terhadap hubungan perdagangan dan ekonomi membuahkan hasil," katanya seperti dikutip AP.

Putin juga mengatakan Rusia dan China telah mengembangkan rencana dan proyek bersama berskala besar di bidang ekonomi

serta lainnya, dan itu akan berlanjut dalam tahun-tahun mendatang. Li memuji upaya Putin dan Presiden China Xi Jinping untuk menyuntikkan momentum kuat dalam mempererat hubungan dan kerja sama bilateral.

Pertemuan Putin dan Li berlangsung saat Rusia berupaya memukul mundur serangan lintas batas pasukan Ukraina ke wilayah Kursk yang kini memasuki minggu ketiga. Kremlin tidak menyebut apakah Putin dan Li membahas Ukraina.

Setelah Barat memberlakukan sanksi berat terhadap minyak Rusia sebagai respons atas invasi Moskow

ke Ukraina pada Februari 2022, China meningkatkan pembelian minyak Rusia secara signifikan. Hal itu meningkatkan pengaruh China di Rusia.

China mencoba memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral dalam konflik Ukraina, tetapi Beijing dan Moskow kebecikan yang sama terhadap Barat. Penilaian intelijen AS menunjukkan China telah meningkatkan penjualan peralatan mesin, mikroelektronika, dan teknologi lain yang digunakan Moskow untuk memproduksi rudal, tank, pesawat, dan persenjataan lainnya ke Rusia secara signifikan. (Bro)-d

HUKUM

LAPAS MAGELANG DIGELEDAH PETUGAS GABUNGAN Ditemukan Barang Diduga Sebagai 'Rajah'

MAGELANG (KR) - Operasi penggeledahan di LP Kelas IIA Magelang (Lapas Magelang) digelar oleh tim gabungan yang terdiri petugas Lapas Magelang, TNI, Polri dan perwakilan BNN Kabupaten Magelang, Rabu (21/8). Dari kegiatan ini, berhasil ditemukan beberapa barang larangan. Bahkan di sebuah kamar berhasil ditemukan sebuah barang yang diduga sebagai 'rajah'.

Kasubbag TU Lapas Magelang, Yudi Winardi, kepada *KR* membenarkan ditemukannya barang yang diduga sebagai 'rajah' tersebut. Barang tersebut berupa tulisan dalam selembar kertas ukuran sekitar 10 Cm dan dilipat. Aroma wangi juga tercium dari barang tersebut.

Yudi mengatakan kegiatan ini merupakan gabungan antara Lapas Magelang, TNI, Polri dan perwakilan dari BNN Kabupaten Magelang, dan dilaksanakan dalam rangka HUT ke-79 Pengayoman. Tujuan kegiatan ini diantaranya agar Lapas Magelang terhindar dari Handphone (HP), Pungli dan

Narkoba (Halinar).

Dibenarkan, dalam kegiatan penggeledahan ini ditemukan barang yang diduga berupa 'rajah' di salah satu kamar di salah satu Blok. Dikatakan Yudi, baru kali ini ditemukan barang yang diduga sebagai rajah. Barang yang diduga rajah tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar.

Selain itu juga ditemukan beberapa korek dan ada diantaranya yang sudah dimodifikasi sehingga api menyala kecil. Keberadaan korek memang sulit diberantas.

Berkaitan dengan adanya kerokan kumis atau jenggot, dikatakan, sebenarnya sudah disediakan di lokasi Komandan Blok. Namun diduga ada yang secara sembunyi-sembunyi yang memasukkan. Di antara kerokan yang ditemukan tersebut ada yang kondisinya masih baru. Beberapa lipstik juga ditemukan dalam kegiatan ini.

Setelah selesai kegiatan penggeledahan, lanjut Yudi, akan langsung dibuatkan berita acara dan dilakukan proses pemusnahan.

(Tha)-f



KR-Sukro Riyadi

Massa menggelar orasi di depan Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul.

BANTUL (KR) - Sekitar 1.000-an pekerja konstruksi yang tergabung dalam wadah Aliansi Paguyuban Pekerja Bantul (AP2B) menggeruduk Kantor Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa Kabupaten Bantul, Rabu (21/8). AP2B menilai ada indikasi *cawe-cawe* pihak swasta terkait tender pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul.

Ketua Posko Perjuangan Rak-

sat DIY sekaligus Koordinator Lapangan dalam aksi tersebut, Endik, dalam orasinya mengungkapkan salah satu pemicu aksi tersebut adanya penundaan jadwal tender oleh Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul. Dampak dari kebijakan tersebut, terjadi penumpukan pekerjaan. Dengan kondisi tersebut, menyulit ketidaksiapan dan kekecewaan di kalangan pekerja.

Dijelaskan, penundaan tender dinilai berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga banyak pekerjaan diselesaikan tergesa-gesa dan hasilnya tidak maksimal. Situasi tersebut berawal adanya dugaan ekspansi PT Merak Jaya Beton

masuk ke Kabupaten Bantul dalam upaya menguasai tender proyek. Menurutnya, hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal warga Bantul. "Kami ingin pihak terkait Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul segera menuntaskan masalah ini agar kami bisa bekerja dengan lebih baik," ujarnya.

Selain itu Endik juga mempertanyakan legalitas material yang digunakan oleh PT Merak Jaya Beton. "Kami menduga bahwa beberapa material yang digunakan tidak memiliki izin resmi, kondisi tersebut yang semakin menambah kekhawatiran mengenai kualitas dan keselamatan para pekerja," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, kenapa Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul tidak menayangkan paket tender secara teratur seperti tahun sebelumnya.

Massa mendesak agar Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul segera memperbaiki prosedur dan memastikan tender dilaksanakan tepat waktu.

Tim Hukum dan Advokasi AP2B, Musthafa SH, menyoroti potensi pelanggaran hukum terkait dengan situasi tersebut. "Terdapat beberapa potensi pelanggaran hukum dapat diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. PT Merak Jaya Beton patut diduga melanggar

Pasal 263 KUHP jika terbukti tidak ada izin material. Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul patut diduga melanggar Pasal 7 ayat 1 Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu ULP bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai jadwal dan aturan yang berlaku. Jika terbukti ada kelalaian atau penyimpangan dalam proses ini, ULP bisa dikenakan sanksi administratif hingga pidana," tegasnya.

Plt Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul, Pambudi Arifin Rakhman SIP, belum bisa memberikan keterangan perihal tersebut. (Roy)-f

TERKATUNG-KATUNG PERPANJANG SERTIPIKAT HGB Warga Geruduk Kantor Pertanahan Kota Yogya

YOGYA (KR) - Lama terkandung-katung dalam mengurus perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), sekitar 50 warga dari DIY bahkan luar kota yang memiliki tanah HGB di Kota Yogya mendatangi Kantor Pertanahan (BPN) Kota Yogyakarta, Rabu (21/8).

Mereka minta kepastian apakah permohonan mereka ditolak atau bisa dilanjutkan dengan pembayaran agar izin perpanjangan cepat turun. "Kita lelah, sudah setahun lebih kami menunggu. Padahal tanah HGB itu kita beli dengan tetes keringat dan air mata. Kok sekarang digantung sehingga tanah tidak bisa dijadikan agunan atau dijual/pindah tangankan," ucap salah satu warga pemegang HGB, ZS Lokasari.

Disebutkan, setiap warga ingin mengetahui kebijakan Kantor Pertanahan sehingga semua warga yang hadir ingin ikut beraudiensi dan tidak dikawatirkan. Rombongan diterima staf BPN Kota Yogya Munakam, Satria dan Wiji mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogya Rudi Prihantoro APTnh MM MH yang berha-

langan hadir.

"Kami kecewa, Pak Rudi berjanji menemui kita tapi justru keluar kantor. Padahal kita butuhkan keputusannya untuk nasib perpanjangan HGB kami," ucap Lokasari disambut celetukan warga lainnya yang kecewa izin perpanjangan HGB nya belum turun.

Menurutnya, saat ini ada sekitar 800-an pemilik HGB yang digantung perpanjangan HGB nya yang menimbulkan keresahan. "Herannya ada yang HGB-nya bisa diperpanjang, khususnya yang menjadi jaminan bank, sedang kita dinyatakan tanah RVO (hak barat) peninggalan kolonial yang saat ini sudah tidak berlaku, sesuai pasal 55 UUPA 5/1960 RVO telah dikonsversi menjadi HGB dan sejak 24 September 1980 menjadi tanah negara. Jadi HGB di atas

tanah negara bukan tanah RVO atau SG demi kepastian hukum dan azas legalitas maka Sertifikat HGB para pemohon harus diperpanjang," tegasnya.

Sementara Munakam menyatakan, pihaknya hanya diberi tugas untuk menerima tamu, warga yang menyampaikan keluhan terkait HGB. "Namun kami tidak bisa putuskan. Nanti keluhan warga ini akan kami sampaikan ke pimpinan,"

jelasnya.

Rencana hasil pertemuan ini akan disampaikan dalam pertemuan dengan Anggota Komisi 2 DPR RI, Riyanta, dalam kunjungan ke Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta, Kamis (22/8). "Keluhan kita mendapat tanggapan serius dari Komisi II DPR RI, dan berharap kebijakan yang bisa mengayomi rakyat dalam hal pertanahan," tegas Lokasari. (Vin)-f



KR-Juvintarto

Warga menggeruduk Kantor Pertanahan Kota Yogya menanyakan nasib perpanjangan sertipikat HGB.